

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2020



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KLATEN**

Jalan Pemuda Nomor : 313 Tlp (0272) 321053 Klaten 57412



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 313 Telp 321053, 322307 Klaten 57412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 910 / 4768.2 /02.4/14

TENTANG

PENETAPAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Nasional di bidang kesehatan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
29. Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/079/31 tentang Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan program pembangunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 2 Juli 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten


dr. Cahyono Widodo, M.Kes

Pembina Tk.I

NIP. 19670210 199603 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya maka telah dapat tersusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020.

Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Selanjutnya diharapkan saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak khususnya dalam upaya mendapatkan data atau informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020, kami sampaikan terimakasih.

Klaten, 2 Juli 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten



dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SK PENETAPAN RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum Renja 2

 C. Maksud dan Tujuan 4

 D. Sistematika 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN 6

 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

 B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

 1. Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci 11

 2. Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 14

 C. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 16

 D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18

 E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN 21

 A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 21

 B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

BAB V PENUTUP 26

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mempedomani Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sementara itu penyusunan Renja SKPD berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Kualitas dokumen Renja SKPD yang merupakan perencanaan tahunan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD dan Forum SKPD. Penyusunan Renja SKPD pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka penyusunan Renja SKPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut : teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan Bottom-up, perencanaan Top-Down.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja SKPD perlu mengembangkan hubungan antara peraturan dan perundangan yang terkait sehingga Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen rencana tahunan mudah diterjemahkan kedalam KUA APBD, RKA SKPD dan APBD.

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja SKPD khususnya dan perencanaan serta penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
29. Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/079/31 tentang Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksud untuk tersedianya dokumen awal perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang akan terjadi di tahun 2020.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman/acuan awal perencanaan program dan kegiatan tahun 2020.
2. Menjabarkan visi, misi, tugas, pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten .
3. Mengakomodir hasil musrenbang.
4. Tersedianya bahan evaluasi kinerja tahun 2020.
5. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada DPA/APBD tahun berjalan, yang selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini mengemukakan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang juga mempertimbangkan analisa rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

4. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

5. BAB V : PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mengemban Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai wujud Komitmen Dinas Kesehatan dalam mengemban fungsi di atas, maka setiap awal tahun Dinas Kesehatan membuat perjanjian kinerja yang tertuang dalam penetapan kinerja. Dengan penetapan kinerja tersebut diharapkan tolok ukur pencapaian kinerja yang direncanakan dan telah dilaksanakan akan dapat dinilai secara akuntabel.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2019 Kabupaten Klaten) Rancangan Renja 2020 ini.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini :

TABEL II.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun 2018

No	PROGRAM	JML KEG	ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA			PENYEBAB TARGET TIDAK TERPENUHI	IMPLIKASI	KEBIJAKAN
				KEUANGAN	%	FISIK (%)			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	2.861.729.100	2.791.155.829	97,53				
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	619.613.000	591.314.506	95,43				
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	1	10.000.000	9.943.000	99,43				
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	30.000.000	30.000.000	100				
5	Obat dan Perbekalan Kesehatan	3	4.913.243.000	4.662.376.012	94,89	99,9	Ada kekosongan obat di Produsen obat ekatalog	2 jenis obat tidak tersupply	Mengoptimalkan stok yang masih ada di IFK
6	Upaya Kesehatan Masyarakat	20	9.022.525.720	7.112.695.005	78,83				
7	Pengawasan Obat dan Makanan	2	55.000.000	54.595.000	99,26	100			
8	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	492.914.500	478.458.800	97,07	100	Sisa anggaran cetak, pembelian bbm, ATK, souvenir karena harga real lebih rendah dari pagu anggaran.	Meningkatkan jangkauan layanan promosi kesehatan melalui media cetak, elektronik dan media sosial.	Mempertahankan kinerja yang sudah ada dan membuat terobosan baru dalam mengembangkan media dan metode promosi kesehatan

							Sisa anggaran sewa gedung karena ada kegiatan yang diselenggarakan tidak memerlukan sewa	Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan	
9	Perbaikan Gizi Masyarakat	3	608.821.625	491.359.750	80,71				
10	Pengembangan Lingkungan Sehat	1	1.125.123.000	994.755.009	88,41	95	- Stimulan jamban RW Sehat tidak semua RW mengambil karena masyarakat sudah mempunyai jamban - Perjalanan dinas di perusahaan tidak bisa dilaksanakan karena kehabisan waktu untuk verifikasi dan deklarasi desa ODF maupun Kecamatan ODF - Perjalanan dinas di Pasar, Sekolah, TTU sudah masuk dalam perjadi Verifikasi ODF	Stimulan jamban tidak bisa dilaksanakan sesuai target Kegiatan pembinaan ke perusahaan tidak bisa dilaksanakan	Di RW Sehat masyarakat sudah mempunyai jamban semua bisa dialihkan ke RW lain yang masyarakatnya belum memiliki jamban
11	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3	669.150.000	476.147.120	71,16	69,8	Kegiatan sebagian bersifat kasusitik sehingga pencapaiannya tergantung kasus yang muncul serta adanya sisa pengadaan	Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan penemuan, Pencegahan , Pengendalian Kasus penyakit dan kesembuhan

12	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	50.000.000	49.998.000	100				
13	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	4	10.161.222.000	9.686.505.850	95,33				
14	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	10	15.971.264.155	15.102.056.732	94,56				
15	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru//Rumah Sakit Mata	1	200.000.000	197.451.500	98,73				
16	Peningkatan Kualitas Perencanaan	2	60.000.000	59.255.400	98,76				
	JUMLAH	74	46.850.606.100	42.788.067.513	91,33				

Berdasarkan capaian realisasi keuangan maupun fisik Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat diketahui bahwa Program dan kegiatan terlaksana dengan baik terbukti dengan capaian kinerja keuangan tahun 2018 sebesar Rp 42.788.067.513,- (91,33%) dari total anggaran sebesar Rp 46.850.606.100,-. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.062.538.587,- (8,67%) dari total anggaran.

Tingginya komitmen Dinas Kesehatan untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan dapat dilihat dari 16 program yang terbagi dalam 74 kegiatan. Sebanyak 61 kegiatan mencapai 100%, 12 kegiatan mencapai rata-rata 70,84% dan satu kegiatan yakni Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah di anggaran kegiatan ditiadakan (dinolkan) karena jumlah yang ada sudah mencukupi.

Sementara itu untuk realisasi keuangan seluruhnya tidak terealisasi sebesar 100% karena efisiensi kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme lelang.

Mulai Tahun 2016 Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sudah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- . Program dan Kegiatan yang bersumber dari Pendapatan BLUD dan Silpa Tahun 2016 & 2017 dianggarkan sebesar Rp. 36.591.248.580,98. Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2018 sebesar Rp. 29.278.567.637,42 atau 97,6% .

Sedangkan untuk realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Pendapatan BLUD tahun 2018 sebesar Rp.32.270.270.940,88 atau 88,19% dari anggaran sebesar Rp.36.591.248.580,98.

Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.295.252.000,- . Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 10.850.000.000,- .

Berdasarkan capaian realisasi Keuangan maupun Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat diketahui bahwa Program dan Kegiatan terlaksana dengan Baik. Realisasi Keuangan Belanja Langsung sebesar 89,91% sedangkan untuk Realisasi Fisik sebesar 100%.

Guna meningkatkan Capain Kinerja RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten maka ada beberapa kebijakan / tindakan yang perlu dilakukan antara lain :

1. Optimalisasi perencanaan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam penyusunan kegiatan mulai dari perencanaan anggaran sampai jadwal pelaksanaan kegiatan;
2. Perlu skala prioritas dalam menentukan kegiatan yang dianggap mendesak dalam pelaksanaannya karena keterbatasan anggaran;
3. Diperlukan peningkatan dan optimalisasi koordinasi yang baik dan solid antara manajemen dengan pelayanan agar program dan kegiatan dapat berjalan optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Klaten tahun 2016-2021 telah ditetapkan target Penetapan Indikator Kinerja Kesehatan selama kurun waktu lima tahun, untuk mengetahui capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dan gap atau target capaian Renstra tahun 2021 atas capaian Kinerja Pelayanan di Dinas Kesehatan dapat dilihat dalam Lampiran II (Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten) Rancangan Renja 2020 ini. Sementara capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

TABEL II.2.1
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2018
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2018
1	Obat dan Perbekalan Kesehatan	% obat generik berlogo dalam persediaan obat	98	98
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	97	92,85
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	82	89,01
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	100	99,98
		Cakupan pelayanan nifas	94	97,54
		Cakupan neunatus dengan komplikasi yang ditangani	82	53,47
		Cakupan kunjungan bayi	94	98,36
		Angka kelangsungan hidup bayi	991	989,23
		Cakupan pelayanan anak balita	94	96,17
		Cakupan peserta KB aktif	72	82,65
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten	100	100
3	Pengawasan Obat dan Makanan	% apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	100	100
		% sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	100	100

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2018
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan sederajat	100	100
		Cakupan desa siaga aktif	100	100
5	Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100
		% Ibu hamil mendapatkan tabel Fe	95	91,71
		% bayi yang dapat ASI Eksklusif	76	75,30
6	Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	100	100
		Cakupan desa <i>open defecation</i> (ODF)	30	79,55
		Persentase penggunaan jamban	96	95,80
		Persentase penggunaan air bersih	98	99,20
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	40	42,2
		Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	99
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100
		Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100
		Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani	138	123
8	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka kesakitan	90	47,98
9	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5	9,67
		Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	97	109
10	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Sarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	84	69,83
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100	100
		Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu	100	100
		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	1	1,2

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui capaian kinerja kesehatan tahun 2018. Terdapat 23 indikator yang capaian kinerjanya bisa tercapai maupun melebihi target kinerja tahun 2018, yaitu (1) % obat generik berlogo dalam persediaan obat; (2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; (3) Cakupan pelayanan nifas; (4) Cakupan kunjungan bayi; (5) Cakupan pelayanan anak balita; (6) Cakupan peserta KB aktif; (7) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten; (8) % apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan; (9) % sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah; (10) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat; (11) Cakupan desa siaga aktif; (12) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; (13) Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis; (14) Cakupan desa *open defecation* (ODF); (15) Persentase penggunaan air bersih; (16) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; (17) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; (18) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); (19) Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam; (20) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; (21) Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin; (22) Cakupan Pelayanan Puskesmas; dan (23) Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu. Keberhasilan ini diharapkan akan dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten.

Selain indikator yang capaian kinerjanya bisa tercapai maupun melebihi target tahun 2018 di atas, terdapat 12 indikator yang capaian kinerjanya masih di bawah target kinerjanya yaitu (1) Cakupan kunjungan ibu hamil K4; (2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan; (3) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; (4) Angka kelangsungan hidup bayi; (5) % Ibu hamil mendapatkan tablet Fe; (6) % bayi yang dapat ASI Eksklusif; (7) Persentase penggunaan jamban; (8) Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA; (9) Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani; (10) Angka kesakitan; (11) % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas, dan (12) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk. Beberapa kegiatan yang tidak tercapai target tersebut terdapat saling keterkaitan dalam pelaksanaannya, misalnya cakupan pelayanan ibu hamil, ibu nifas dan kesehatan bayi baru lahir dengan pemeriksaan kesehatan orang dengan TBC dan skrining HIV. Sehingga diperlukan koordinasi antar seksi di Dinas Kesehatan maupun pelaksana di Puskesmas. Selain itu beberapa kegiatan dalam pelayanan skrining kesehatan, pelayanan hipertensi dan pelayanan DM dalam penghitungan target berdasarkan estimasi jumlah penduduk dan prevalensi hasil riskesdas secara nasional sehingga apabila diterapkan secara riil masih jauh dari target, dalam penegakan diagnosa membutuhkan pemeriksaan laboratorium namun sebagian masyarakat belum mau diperiksa karena terkendala biaya.

Sedangkan tugas pokok Rumah Sakit Daerah Bagas Waras adalah menyelenggarakan pemenuhan hak dasar dalam urusan kesehatan dengan mengutamakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2018, Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR / Bed Occupancy Ratio), bila pada kondisi kinerja awal yakni tahun 2015 sebesar 14,7%, maka capaian tahun 2018 sebesar 49,10 % dari target 2018 sebesar 62%.

2. Capaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan

Selain Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja SKPD, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu Peraturan menteri kesehatan No 741 tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. SPM berdasarkan Permenkes ini diterapkan sampai dengan Tahun 2016 bersamaan dengan terbitnya Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang digunakan mulai Tahun 2017. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan digunakan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana urusan wajib bidang kesehatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya di Kabupaten Klaten. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2.2
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2012-2018
Kabupaten Klaten

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	89.98	91.26	92,94	91,72	92,84	-	-
		2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	86.41	97.45	108,06	107,16	97,88	-	-
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	100	100	102,34	99,98	100	-	-
		4. Cakup pelayanan Ibu Nifas	89.31	94.52	96,74	96,30	96,98	-	-
		5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	39	65.40	65,78	62,46	54,93	-	-
		6. Cakupan kunjungan bayi.	93	98.96	95,86	95,72	96,04	-	-
		7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	-	-
		8. Cakupan pelayanan anak balita.	69	90.28	89	92,79	94	-	-
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100				12,83	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	-	-
		11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	99,07	100	100	-	-
		12. Cakupan peserta KB Aktif	82	65.48	76,62	79,57	81,81	-	-
		13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit						-	-
		a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	0.002	100	100	100	140	-	-
		b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	17.24	25.61	17,59	81,66	68,74	-	-
		c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	24.22	31.83	23,99	26,33	14,21	-	-
		d. Penderita DBD yang Ditangani	100	100	100	100	100	-	-
		e. Penemuan Penderita Diare	73.34	72.38	130,09	100	118,51	-	-
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	88.58	93.29	64,10	94,15	99,15	-	-
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	88.58	10.49	26	10,25	8,78	-	-
		16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.		100	100	100	100	-	-
III	Penyelidikan	17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100	100	100	-	-
IV	Promosi	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100	-	-
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		-	-	-	-	-	92,85	92,51
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		-	-	-	-	-	100	99,98
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		-	-	-	-	-	97,57	98,05

	Pelayanan Kesehatan Balita	-	-	-	-	-	95,25	96,17
	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-	100	100
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	-	-	-	-	-	31,52	48,75
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	-	-	-	-	-	85,90	80,51
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	-	-	-	46,99	67,44
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	-	-	-	57,58	48,70
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	-	-	81,04	85,61
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	-	-	-	-	-	99,65	98,92
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	-	-	-	-	-	64,81	81,72

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi program, permasalahan program kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang perlu mendapat perhatian untuk dapat ditindaklanjuti dalam rencana program dan kegiatan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3
Permasalahan, Hambatan, dan Rencana Tindak Lanjut
Sebagai Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

No	Isu Penting	Permasalahan	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1	Percepatan penurunan AKI, AKB, Stunting dan Gizi Buruk	Capaian kinerja terhadap kegiatan ini masih di bawah target	- SDM Bidan dan Gizi di puskesmas masih kurang dan <i>double job</i> menjadi bendahara dll, sehingga mengurangi waktu penyelesaian tugas utama. - Untuk kegiatan yang melibatkan lintas sektoral belum optimal, padahal pengaruhnya 70 %	- Optimalisasi Anggaran dan waktu untuk akselerasi kegiatan karena diharapkan Tahun 2019 bendahara BLUD sudah tidak dibebankan pada petugas Gizi dan KIA - Optimalisasi kegiatan knvergensi
		Kondisi perilaku PHBS masyarakat yang masih rendah sehingga berpengaruh pada kondisi stunting dan gizi buruk	Kurangnya SDM tenaga kesehatan dalam mendampingi masyarakat untuk melakukan PHBS	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk mendorong PHBS di masyarakat
2	Peningkatan Penemuan kasus TB	Capaian kinerja masih di bawah target kegiatan	Dalam beberapa kasus terjadi penolakan pemeriksaan pada ibu hamil	Program Tripel Eliminasi (Pencegahan penularan HIV, Hepatitis dan Sifilis) dari ibu ke anak

		Kurangnya informasi tentang deteksi dini kasus TB	Terbatasnya informasi kepada masyarakat	Memberikan informasi yang tepat sehingga masyarakat sadar akan pentingnya penemuan kasus TB lebih awal dan pengobatan secara rutin
3	Deteksi dini kanker cervik melalui IVA test	Cakupan pelayanan IVA test masih rendah	Keterbatasan tenaga yang dilatih pemeriksaan IVA	Pelatihan tenaga kesehatan untuk pemeriksaan IVA Test
	Deteksi dini Penyakit Tidak menular melalui Posbindu PTM	Belum semua desa ada Posbindu	Pemahaman dari masyarakat dan stakeholder tentang manfaat Posbindu masih rendah	Peningkatan Sosialisasi dan Pembentukan Posbindu PTM
	Peningkatan penanganan gangguan jiwa di masyarakat	Kecenderungan meningkatnya kasus gangguan jiwa	Sebagian besar masyarakat dan sebagian stake holder masih memandang sebelah mata pada kasus jiwa di masyarakat	Peningkatan sosialisasi, koordinasi dan kompetensi petugas serta kader dalam penanganan masalah kesehatan jiwa
	Pengendalian perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok)	Semakin meningkat jumlah perokok di masyarakat	Kesadaran akan bahaya merokok masih rendah	Pembuatan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok
		Kurangnya akses posbindu bagi masyarakat yang bekerja	Waktu pelaksanaan posbindu biasanya di lingkungan rumah tinggal dan dilaksanakan pada jam kerja	Membentuk Posbindu di tingkat kecamatan dengan sasaran masyarakat yang bekerja di tingkat kecamatan, bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan posbindu bagi karyawannya
4	Pembiayaan Universal Health Coverage (UHC)	Kualitas pelayanan dan SDM masih perlu ditingkatkan	Basis data terpadu belum terbangun dengan baik bagi masyarakat yang belum punya jaminan	Penambahan kepesertaan untuk basis data terpadu yang belum memiliki jaminan kesehatan
5	Peningkatan Cakupan Desa ODF, RW Sehat dan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Permasalahan klasik yang terkait dengan kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah	Keterbatasan anggaran untuk pencaangan desa ODF baru, RW Sehat dan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Penambahan anggaran untuk meningkatkan cakupan desa ODF, RW Sehat dan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

6	Promosi kesehatan melalui berbagai media	Promosi masih dinilai kurang gencar dan proaktif	Keterbatasan anggaran untuk membiayai promosi melalui media cetak, visual, radio, baliho dll	Penambahan anggaran untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan
		Kurangnya tenaga promosi kesehatan di dinas maupun di puskesmas	Keterbatasan rekrutmen ASN promosi kesehatan	Pengadaan rekrutmen tenaga promosi kesehatan melalui BOK
		Kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten untuk melakukan promosi kesehatan	Keterbatasan anggaran untuk membiayai peningkatan kapasitas petugas	Penambahan anggaran untuk peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang promosi kesehatan
7	Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, Imunisasi BIAS, Imunisasi baduta, Surveilans, kewaspadaan dini dan respon KLB	Kerjasama dengan lintas sektor dalam kegiatan sosialisasi masih perlu ditingkatkan	Tidak semua masyarakat paham arti pentingnya imunisasi karena kepercayaan tertentu yang menolak imunisasi	Diupayakan peningkatan informasi kepada masyarakat melalui media massa, leaflet, baliho dll
	Pembinaan Pengawasan obat dan Makanan	Seiring perkembangan zaman dan teknologi, kegiatan melanggar hukum/peraturan terkait obat dan Makanan semakin marak terjadi	Keterbatasan anggaran dan SDM pelaksana Pengawasan obat dan Makanan	Penambahan anggaran dan SDM yang kompeten Pembentukan Tim koordinasi/ Satgas Pengawasan obat dan Makanan lintas sektor terkait

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD Tahun 2020. Berdasarkan hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang perlu untuk dikurangi atau ditambahkan antara lain yaitu:

1. Pendampingan Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Merokok merupakan kebiasaan yg mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, kelompok, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan. Amanah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya pasal 115 ayat 2 bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
2. Pembiayaan Universal Health Coverage (UHC)
UHC adalah suatu konsep reformasi pelayanan kesehatan yang mencakup beberapa aspek antara lain 1) Aksesibilitas dan equitas pelayanan kesehatan; 2) Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif yang meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative dan 3) Mengurangi keterbatasan financial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk. Masyarakat Kabupaten Klaten belum seluruhnya memiliki

jaminan kesehatan sehingga perlu adanya pembiayaan UHC untuk menambah kepesertaan sehingga terbangun basis data terpadu. Disamping itu juga diperlukan SDM pendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

3. Usulan Nama Kegiatan Baru.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten maka perlu adanya penyesuaian nama program dan kegiatan yang relevan dengan seksi dan bidang baru yang ada di Dinas Kesehatan.

4. Pendampingan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Anggaran Pendampingan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dari dana APBD dibutuhkan untuk memenuhi biaya umum yang timbul dalam proses pelaksanaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dibiayai dari anggaran DAK. Hal ini dikarenakan mulai tahun anggaran 2019, seluruh dana DAK Subbidang Kefarmasian harus digunakan untuk Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tidak diperbolehkan untuk biaya umum/ penunjang kegiatan tersebut. Biaya umum meliputi: biaya rapat-rapat perencanaan obat terpadu, biaya ATK dan penggandaan, biaya monev pengadaan obat Puskesmas, serta Honor-Honor pegawai.

5. Management Informasi Sarana dan Prasarana

Perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelaporan dari Pusat dalam hal Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan melatarbelakangi perlunya kegiatan ini. Pengelolaan Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan/ ASPAK dari Kemenkes membutuhkan dukungan anggaran terutama untuk kegiatan verifikasi/ validasi sarana, prasarana dan alat kesehatan secara langsung ke seluruh unit pelayanan kesehatan se-Kabupaten Klaten agar dapat dipastikan validitas datanya. Dengan dikelolanya Aplikasi ASPAK dengan baik, manfaatnya tidak hanya pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu dengan data yang valid kepada Kementerian Kesehatan RI, namun juga dari pihak Dinas Kesehatan dapat memanfaatkan data yang ada di aplikasi dalam hal penilaian pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang ada terhadap standar Permenkes, serta sebagai dasar proyeksi perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2020

Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten kecuali Kecamatan Cawas dan Bayat	Jumlah Jenis kegiatan Stop BABS	- 10 RW Sehat baru - 5 RW Sehat lama - 268 Desa/Kel ODF	
	Pendampingan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan	2 Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan	
	Management Informasi Sarana dan Prasarana Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang menerapkan Manajemen Informasi Sarana dan Prasarana	34 Puskesmas	
	Komunikasi perubahan perilaku untuk mencegah stunting	Seluruh OPD, BUMN/ BUMD, Camat/ Kepala Desa, Organisasi Profesi Kesehatan, Ormas, Pimpinan Dunia Usaha di Kabupaten Klaten	Jumlah dan Jenis kegiatan yang ada di Surat Edaran Bupati Nomor 440/229/14 Tanggal 19 Desember 2018 tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat untuk Mencegah Stunting Yang Terkait dengan Peningkatan Gizi sebagai Intervensi Germas	- 10 OPD - 10 BUMN/ BUMD - 26 Camat - 401 Kepala Desa/ Lurah - 7 OP Kesehatan - 5 Ormas - 5 Dunia Usaha	

Sedangkan Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Bagas Waras didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Rumah Sakit Daerah Bagas Waras selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 mengacu pada kebijakan dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.1
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten
dengan Usulan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Klaten	Program dalam Renja 2020
1. Pembangunan manusia	1. Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin 2. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan <i>stunting</i> , penuntasan ODF, peran Posyandu)	1. Peningkatan layanan kesehatan melalui kemudahan akses-akses layanan kesehatan 2. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan 3. Pemerataan kualifikasi tenaga kesehatan 4. Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan 5. Peningkatan promotif dan preventif pelayanan kesehatan 6. Peningkatan kesadaran masyarakat pola hidup sehat	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

	3. Peningkatan akses, mutu dan standarisasi pelayanan kesehatan 4. Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumber daya kesehatan		10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 12. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata 13. Program Pelayanan Kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 telah ditetapkan bahwa tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu “Mewujudkan Kualitas derajat kesehatan bagi masyarakat (waras oriented)”.

b. Sasaran

- 1. Terlayaninya penanganan masyarakat miskin dalam upaya peningkat derajat kesehatan masyarakat.
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan tenaga medis.
- 3. Rehabilitasi sarana prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kesehatan masyarakat.

c. Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Kebijakan, Tujuan, Sasaran tersebut di atas, untuk mewujudkan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2020 maka Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten merencanakan program dan kegiatan tahun 2020. Rencana Program dan kegiatan SKPD tahun 2020 mencakup 16 Program dan 78 Kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - l. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
 - m. Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor
 - n. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Mebeleur
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g. Penataan Lingkungan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Bid. Kesehatan)
 - b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - c. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit (DAK Bid. Kesehatan)
 - d. Pengelolaan Manajemen Obat
 - e. Distribusi Obat dan E Logistik (DAK Non Fisik)

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Pendampingan Polindes
 - b. Bintek Balai Pengobatan/RB dan Lab. Swasta
 - c. Penunjang Operasional PPPK
 - d. Penunjang Operasional Pelayanan Izin di Bidang Kesehatan
 - e. Akreditasi Puskesmas
 - f. Pemilihan Paramedis, Medis Teladan dan Puskesmas Berprestasi
 - g. Pembuatan Buku Profil Kesehatan
 - h. Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan
 - i. Peningkatan Manajemen Puskesmas
 - j. Peningkatan Kinerja Klinik
 - k. Pembuatan Buku KIA
 - l. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
 - m. Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK Non Fisik)
 - n. Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
 - o. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
 - p. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DBHCHT)
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - a. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
 - b. Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
 - c. Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
 - b. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
 - c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - a. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga
 - b. Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - a. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
 - b. Peningkatan Kesehatan Lingkungan
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - a. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - b. Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular
 - c. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
 - d. Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (DBHCHT)
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
 - b. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

- c. Penunjang Kegiatan Puskesmas
 - d. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah
12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - a. Pelayanan Operasi Katarak
 - b. Visum at Repertum
 - c. Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)
 - d. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Rentan
 13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
 - c. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
 - d. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
 - e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
 - f. Pembangunan Puskesmas (DAK Bid. Kesehatan)
 - g. Pembangunan Puskesmas (DBHCHT)
 - h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DBHCHT)
 14. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
 - a. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
 - b. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
 - c. Pengadaan Prasarana Rumah Sakit
 15. Program Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan
 - a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
 16. Program Pelayanan Kesehatan
 - a. Pelayanan Kesehatan RSUD

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Lampiran III (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Klaten) Renja 2020 ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 ini memuat rancangan kerangka ekonomi kesehatan, prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif sebagaimana amanat Undang-Undang, maka Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun sebagai dasar/pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah serta Rancangan APBD Kabupaten Klaten 2020.

Adapun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan peraturan Pemerintah Pusat dan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah Kabupaten dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum SKPD Kabupaten maupun forum gabungan SKPD kabupaten yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA).

Dokumen ini berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah serta sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Klaten selain dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Klaten sesuai Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dapat terwujud.

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Target Kabupaten Klaten menjadi Kabupaten ODF pada tahun 2019 sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah desa ODF di Kabupaten Klaten mencapai 319 desa atau 79,55%. Sehingga pada tahun 2019 ini, target 82 desa yang belum ODF harus dituntaskan sampai dengan akhir tahun nanti.

Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM yang meliputi 5 pilar yaitu tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Dalam mencapai akses sanitasi 100% maka diperlukan adanya tangga Sanitasi yakni pemicuan/desa melaksanakan STBM, desa ODF/Stop BABS dan akhirnya adalah desa STBM (desa yang telah mencapai 100% penduduk melaksanakan 5 pilar STBM).

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2020. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2020.

Agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2020 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antara sekretariat dan bidang;
2. Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2020 memfokuskan pada pencapaian target indikator SPM dan SDG's, oleh karena itu seluruh elemen kesehatan harus bekerja lebih optimal untuk pencapaian target SPM dan SDG's tersebut.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.
4. Dalam melaksanakan kegiatan di Tahun 2020 tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Pembangunan membutuhkan transparansi sebagai suatu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami masyarakat. Hal ini tentu saja membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun kebijakannya agar efektif sesuai dengan target kegiatan sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat terakomodir. Dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya sehingga memerlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perubahan paradigma pembangunan kesehatan menjadi paradigma sehat.
2. Membangun peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam segala bentuk tahapan penyelenggaraan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang layak.
3. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan kesehatan.
4. Memasifkan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2020 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.***

Klaten, 2 Juli 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten



dr. Cahyono Widodo, M.Kes

Pembina Tk I

NIP. 19670210 199603 1 006

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN

Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Pilihan : Wajib										
Bidang Urusan : Dinas Kesehatan										
1.02 . 1.02.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100	93,57	100	97,53	97,53	100	97,03	97,03
1.02 . 1.02.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun	13800	4000	2000	2000	100,00	2300	8300	60,14
1.02 . 1.02.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya penunjang operasional kantor Dinas Kesehatan selama 1 tahun	72	24	12	12	100,00	12	48	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan di jajaran Puskesmas se-Kabupaten Klaten	71	53	60	60	100,00	71	61,33	86,38
1.02 . 1.02.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya upah tenaga kontrak kebersihan di Puskesmas Kabupaten Klaten	37	34	43	43	100,00	37	38	102,70
1.02 . 1.02.01.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya barang-barang peralatan kerja di Dinas Kesehatan Kab. Klaten	30	10	5	5	100,00	5	20	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor untuk mendukung oprasional kegiatan di Dinas Kesehatan	15	9	15	15	100,00	15	13	86,67
1.02 . 1.02.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan keperluan barang cetakan dan penggandaan	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penarangan bangunan kantor	10	11	10	10	100,00	10	10,33	103,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 1.02.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksanaannya penyediaan makan minum rapat dan jamuan kunjungan tamu selama 1 tahun	72	24	12	12	100,00	12	48	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas oprasional ke luar daerah selama 1 tahun	350	100	50	50	100,00	100	250	71,43
1.02 . 1.02.01.01 . 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas oprasional ke luar daerah selama 1 tahun	470	140	70	70	100,00	120	330	70,21
1.02 . 1.02.01.01 . 01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terbayarnya upah tenaga kontrak penjaga malam di puskesmas Kab. Klaten	47	48	51	51	100,00	47	48,67	103,55
1.02 . 1.02.01.01 . 01.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Terbayarnya upah tenaga pengemudi di Dinas Kesehatan Klaten	8	8	9	9	100,00	8	8,33	104,17
1.02 . 1.02.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang meningkat umur ekonomisnya	100	96,21	100	95,43	95,43	100	97,21	97,21
1.02 . 1.02.01.01 . 02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional terbeli	6	2				2	4	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100	36	16	16	100,00	30	82	82,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksanya pengadaan fasilitas penunjang operasional mebelair di Dinas Kesehatan	209	99	29	29	100,00	21	149	71,29
1.02 . 1.02.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	47	59	59	59	100,00	47	55	117,02
1.02 . 1.02.01.01 . 02.53	Penataan lingkungan kantor	Jumlah Lingkungan Kantor tertata	4	4				4	2,67	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang berkualitas	100	99,86	100	99,43	99,43	100	99,76	99,76
1.02 . 1.02.01.01 . 03.06	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan budaya kerja pegawaian	72	24	12	12	100,00	12	48	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas dokumen pelaporan	100	99,29	100	100	100,00	100	99,76	99,76
1.02 . 1.02.01.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
1.02 . 1.02.01.01 . 06.06	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaporan Asset Daerah	Jumlah dokumen keuangan dan asset	40	8	8	8	100,00	8	24	60,00

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 1.02.01.01 . 16.16	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes	Terlaksananya pembinaan kader kesehatan reproduksi, kader lansia di 34 Puskesmas, audit kasus maternal perinatal, terlacknya kematian maternal dan bayi, tercetaknya kohort	5	9	8	8	100,00	7	8	160,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.17	Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta	Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi klinik, rumah sakit, dan lab swasta di wilayah kabupaten klaten	40	40	40	40	100,00	40	40	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.18	Penunjang Operasional PPPK	Terlaksanananya bntuan PPPK 239 Paket PPPK instansi negeri maupun swastaHUT,Hari raya,Hari Jadi,Natal Tahun Baru,Haji ,gerak jalan Kepurun dll	250	250	250	250	100,00	250	250	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.19	Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan	Tinjauan lapangan pemohon perijinan dalam bidang kesehatan	3000	1000	500	500	100,00	500	2000	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 16.20	Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya penyiapan akreditasi penuh di 2 Puskesmas dan bintek ke 5 Puskesmas serta penyiapan akreditasi 8 Puskesmas	34	23	11	11	100,00	7	41	120,59
1.02 . 1.02.01.01 . 16.21	Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi	Terlaksananya penilaian 4 kategori nakes teladandan terlaksanakan penilaian 2 kategori Puskesmas berprestasi	6	6	6	6	100,00	6	6	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.22	Pembuatan Buku Profil Kesehatan	Tersusunnya buku profil kesehatan	480	160	80	80	100,00	80	320	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 16.23	Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya pengadaan bahan-bahan penunjang pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan	300	100	50	50	100,00	50	200	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 16.24	Peningkatan manajemen puskesmas	Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi manajemen puskesmas	34	18	18	18	100,00	18	54	158,82
1.02 . 1.02.01.01 . 16.25	Peningkatan kinerja klinis	Terlaksananya pelatihan petugas Puskesmas tentang USG dan petugas Laboratorium	64	64	64	64	100,00	64	64	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.26	Pembuatan buku KIA	Tercetaknya buku KIA	10700	10700	10700	10700	100,00	10700	10700	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.27	Sistim penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Tertanggulangnya kejadian kegawatdaruratan di kabupaten klaten melalui call center 119	46	46	46	46	100,00	46	46	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.28	Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah	Tersedianya biaya oprasional Ambulance dan mobil jenazah dan piket sopir	3	3					3	100,00

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 1.02.01.01 . 19.06	Penyuluhan Kesehatan masyarakat	Terlaksananya penyuluhan kesehatan masyarakat melalui pertemuan sosialisasi, pembinaan petugas, kader kesehatan dan siaran radio	34	34	34	34	100,00	34	34	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Terlaksananya koordinasi linsek linprog dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat/UKBM	51	51	51	51	100,00	51	51	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19.08	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya koordinasi linprog linsek, advokasi PHBS di semua tatanan dan, pengadaan media promosi kesehatan, gerakan cuci tangan pakai sabun dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat/UKBM	636	212	106	106	100,00	106	424	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 19.09	Penyuluhan Kesehatan masyarakat (DBHCHT)	Frekuensi kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten	24		24	24	100,00	24	16	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		% Ibu hamil mendapatkan tablet Fe	98,00	93,22	95,00	91,71	96,54	98,00	94,31	96,23
		% bayi yang dapat ASI Eksklusif	79,00	72,25	76,00	75,30	99,08	77,00	74,85	94,75
1.02 . 1.02.01.01 . 20.07	Upaya perbaikan gizi keluarga	Terlaksananya Pembinaan Teknis Program Gizi bagi Petugas Gizi Puskesmas	34	34	34	34	100,00	34	34	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.08	Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya pembinaan konselor ASI, pengadaan media promosi ASI, monitoring penerapan IMD dan ASI ke Puskesmas	34	34	34	34	100,00	34	34	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.11	Upaya perbaikan gizi keluarga (DBHCHT)	Jumlah kegiatan perbaikan gizi	32		8	8	100,00	8	16	50,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Pengelolaan limbah medis dan non medis	100,00	86,77	100,00	100,00	100,00	100,00	95,59	95,59
		Cakupan desa open defecation free (ODF)	45,00	26,44	30,00	79,55	265,17	35,00	47,00	104,43
		Persentase penggunaan jamban	100,00	89,74	96,00	95,80	99,79	100,00	95,18	95,18
		Persentase penggunaan air bersih	100,00	96,78	98,00	99,20	101,22	100,00	98,66	98,66

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 1.02.01.01 . 21.05	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya bantuan jamban, TMMD dan P2MBG, terbinanya sanitarian Puskesmas, sosialisasi pamsimas, klinik sanitasi, bintek dan monev pamsima SAB desa minipolitan, inspeksi SAB 20 SAM PDAM, inspeksi sanitasi DAMIU dan pengadaan sanitarian kit dan fielt kit	600	200	100	100	100,00	100	400	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 21.06	Pengelolaan Limbah Medis B3	Terlaksananya kegiatan pengelolaan limbah B3 di Puskesmas dan UPTD Lab	100	100					100	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21.07	Pengadaan IPAL Puskesmas Karangnongko, Puskesmas Karanganom dan LabKes Solusi Dinas Kesehatan (2POA)	Jumlah IPAL	3	3					3	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	48,00	44,45	40,00	42,20	105,50	42,00	42,88	89,34
		Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100,00	100,00	100,00	99,00	99,00	100,00	99,67	99,67
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan desa/kelurahan Universal Chlid immunication (UCI)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani	168,00	135,50	138,00	123,00	89,13	148,00	135,50	80,65
1.02 . 1.02.01.01 . 22.12	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terselenggaranya kegiatan Imunisasi, Survellans, KLB (Kejadian Luar Biasa), Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Kesehatan Jamaah Haji di Kabupaten Klaten	984	328	164	164	100,00	164	656	66,67
1.02 . 1.02.01.01 . 22.13	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya koordinasi diare kusta, P2ML dan TPM, terjaringanya 15 penderita kusta, dan penderitaan HIV AIDS, tersedianya logistik diare kusta ISPA dan PTM serta pengadaan 43 reagen ziehlneelson, pelayanan VCT di 2 klinik	240	80	40	40	100,00	40	160	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcomes)/Kegiatan (output)</i>	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 1.02.01.01 . 22.14	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Terlaksananya pertemuan evaluasi/koordinasi/pelatihan dengan puskesmas/masyarakat/KOMPLI dalam rangka pengendalian penyakit bersumber binatang	1340	400	215	215	100,00	225	840	62,69
1.02 . 1.02.01.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka kesakitan	100,00	168,50	90,00	47,98	53,31	100,00	105,49	105,49
1.02 . 1.02.01.01 . 23.07	Penunjang kegiatan Puskesmas	Terlaksananya oprasional kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas serta movev dan pelaporannya	34	34					34	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 23.08	Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan	Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran yang berbasis optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat	34	34					34	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 23.11	Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan	Terlaksanaannya perencanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan program pelayanan kesehatan							0	#DIV/0!
1.02 . 1.02.01.01 . 23.12	Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Puskesmas	34	34					34	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 23.14	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah kegiatan	275		53	53	100,00	72	125	45,45
1.02 . 1.02.01.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5,00	6,89	5,00	9,67	193,40	5,00	7,19	143,73
		Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	100,00	122,54	97,00	109,00	112,37	98,00	109,85	109,85
1.02 . 1.02.01.01 . 24.01	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya bantuan oprasi katarak pada 60 penderita	30	60	30	30	100,00	30	40	133,33
1.02 . 1.02.01.01 . 24.11	Visum at Repertum	Terlaksananya penanganan kasus visum at repertum	21	21	21	21	100,00	21	21	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 24.12	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)	Terlaksananya Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, PBI APBD di Kabupaten Klaten	30000	30000	30000	30000	100,00	30000	30000	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 24.16	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin / BPJS (DBHCHT)	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat	18000		4500	4500	100,00	4500	9000	50,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	90,00	66,33	84,00	69,83	83,13	86,00	74,05	82,28
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	1,00	1,25	1,00	1,20	120,00	1,00	1,15	115,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.01	Pembangunan Puskesmas (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah Gedung Puskesmas terbangun	27	6	3	3	100,00	8	17	62,96
1.02 . 1.02.01.01 . 25.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah Puskesmas terpenuhi saran dan prasarananya	66	34	1	1	100,00	1	36	54,55
1.02 . 1.02.01.01 . 25.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab	12		1	1	100,00	3	4	33,33
1.02 . 1.02.01.01 . 25.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	Jumlah gedung puskesmas pembantu yang direhab	55		10	10	100,00	15	25	45,45
1.02 . 1.02.01.01 . 25.24	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan, maintenance web dan simpus dan laboratorium IT	34	34	34	34	100,00	34	34	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.26	Penyediaan Alat Antropometri (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah alat Antropometri yang tersedia	170					170	170	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.26	Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan (DAK)	Terlaksananya dana alokasi khusus bidang pelayanan dasar (DAK)							0	#DIV/0!
1.02 . 1.02.01.01 . 25.27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah (DAK Bid. Kesehatan)	Tersedianya sarana prasarana kesehatan di 34 Puskesmas dan Dinas Kesehatan							0	#DIV/0!
1.02 . 1.02.01.01 . 25.27	Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK Fisik)	Jumlah Puskesmasling	6	4				2	6	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.27	Pendampingan DAK Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Puskesmas dibangun							0	#DIV/0!
1.02 . 1.02.01.01 . 25.28	Penyediaan Cryoterapy (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah alat Cryoterapi yang tersedia	1					1	1	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.28	Pengadaan Alkes Puskesmas Rawat Inap (2 POA)	Jenis Alkes	10	10					10	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.29	Penghadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah bahan habis pakai pemeriksaan HIV dan Viraload yang tersedia	20					20	20	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.29	Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk PSC / SPGDT (DAK FISIK)	Jumlah bulan langganan akses internet PSC 119	36	12	12	12	100,00	12	36	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.30	Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah alat posbindu kit yang tersedia	118					118	118	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.32	Pengadaan Peralatan Pendukung Immunisasi (DAK Penugasan)	Tersedianya peralatan pendukung immunisasi	4		4	4	100,00		4	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.33	Rehabilitasi Bangunan Gedung Puskesmas (DBHCHT)	Jumlah puskesmas yang direhab	4		4	4	100,00		4	100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25.34	Pengadaan Puskesmas Keliling (DBHCHT)	Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling	2		2	2	100,00		2	100,00

Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pengadaan Sarana dan Prasarana (DBHCHT)	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	8		8	8	100,00		8	100,00
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ratio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk	1,38	1,38	1,38	1,49	107,97	1,38	1,42	102,66
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah dokumen review DED	4		3	3	100,00	1	4	100,00
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	- Jumlah dokumen perencanaan Renstra PD disusun tepat waktu - Jumlah dokumen perencanaan Renja PD disusun tepat waktu	100	84,86	100	98,76	98,76	100	94,54	94,54
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) dengan baik dan tepat waktu	6	6	6	6	100,00	6	6	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan monev pengendalian internal SKPD	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00

Klaten, 2 Juli 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 006

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (tahun berjalan)
KABUPATEN KLATEN

Nama Perangkat Daerah : UPT RSD Bagas Waras Dinkes Klaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
1.02	Bidang Urusan Kesehatan									
1.02.1.02.03.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	80,50%	100%	82,70%	82,70%	100%	87,73%	87,73%
1.02.1.02.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat di RSUD Bagas Waras	15.000	2909	0	0	0,00%	0	2909	19,39%
1.02.1.02.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6	2	1	1	100,00%	1	4	66,67%
1.02.1.02.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih	220	30	30	30	100,00%	30	90	40,91%
1.02.1.02.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	327	52	0	0	0,00%	0	52	15,90%
1.02.1.02.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	325	50	0	0	0,00%	0	50	15,38%
1.02.1.02.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	297	47	0	0	0,00%	0	47	15,82%
1.02.1.02.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	180	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.1.02.03.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor/ RSUD	5	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.02.1.02.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat	600	600	0	0	0,00%	0	600	100,00%
1.02.1.02.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya akomodasi perjalanan dinas luar daerah	725	100	52	52	100,00%	0	152	20,97%
1.02.1.02.03.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya akomodasi perjalanan dinas dalam daerah	300	50	0	0	0,00%	0	50	16,67%
1.02.1.02.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor RSUD Bagas Waras	170	30	30	30	100,00%	30	90	52,94%
1.02.1.02.03.01.01.29	Penyediaan jasa medis dan paramedis	Tersedianya jasa medis dan paramedis	150	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.02.1.02.03.01.01.30	Penyediaan jasa pengelola taman RSUD	Tersedianya jasa pengelola taman RSUD	10	10	0	0	0,00%	0	10	100,00%
1.02.1.02.03.01.01.31	Penyediaan jasa tenaga Non PNS RSUD	Tersedianya jasa tenaga Non PNS RSUD	280	280	0	0	0,00%	0	280	100,00%
1.02.1.02.03.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%	93,33%	0	0	0,00%	100%	64,44%	64,44%
1.02.1.02.03.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terbeli	0	2	0	0	0,00%	0	2	#DIV/0!
1.02.1.02.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	17	12	0	0	0,00%	0	12	70,59%
1.02.1.02.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	28	10	0	0	0,00%	0	10	35,71%
1.02.1.02.03.01.02.08	Pengadaan mebeleur	Tersedianya almari , meja, kursi, rak dan mebeleur kantor	4	4	0		0,00%	0	4	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.1.02.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional RSUD	120	20	0	0	0,00%	0	20	16,67%
1.02.1.02.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung / kantor	105	68	0	0	0,00%	0	68	64,76%
1.02.1.02.03.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeler kantor RSUD	120	14	0	0	0,00%	0	14	11,67%
1.02.1.02.03.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi	Terpeliharanya SIM RSUD	5	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.02.1.02.03.01.02.50	Pengadaan Papan Informasi	Tersedianya Baliho informasi RSUD	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.02.1.02.03.01.02.53	Penataan lingkungan kantor	Jumlah lingkungan kantor tertata	0	1	0	0	0,00%	0	1	#DIV/0!
1.02.1.02.03.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	86,42%	0	0	0,00%	0	86,42%	86,42%
1.02.1.02.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian seragam karyawan RSUD	2.350	367	0	0	0,00%	0	367	15,62%
1.02.1.02.03.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi petugas lapangan	63	13	0	0	0,00%	0	13	20,63%
1.02.1.02.03.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	94,90%	0	0	0,00%	0	94,90%	94,90%
1.02.1.02.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan RSUD	300	50	0	0	0,00%	0	50	16,67%
1.02.1.02.03.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	86,43%	100,00%	98,76%	98,76%	100%	95,06%	95,06%
1.02.1.02.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP 2016 dengan baik dan teoat	5	2	1	1	100,00%	1	4	80,00%
1.02.1.02.03.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya dokumen pelaporan realisasi anggaran	6	2	0	0	0,00%	0	2	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.1.02.03.01.06.06	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan dan pelaporan aset	6	2	0	0	0,00%	0	2	33,33%
1.02.1.02.03.01.06.08	Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	6	6	0	0	0,00%	0	6	100,00%
4.03.1.02.03.01.27	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan	100%	95,98%	100%	94,99%	94,99%	100%	96,99%	96,99%
4.03.1.02.03.01.27.02	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD	30	1	6	6	100,00%	6	13	43,33%
4.03.1.02.03.01.27.03	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Tersusunnya laporan money & pengendalian internal SKPD	30	1	1	1	100,00%	1	4	13,33%
1.02.1.02.03.01.15	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya obat dan perbekalan kesehatan	100,00%	87,50%	0	0	0,00%	0	87,50%	87,50%
1.02.1.02.03.01.15.07	Pengelolaan Manajemen Obat	Terlaksananya menjemen pengelolaan obat RSUD	600	97	0	0	0,00%	0	97	16,17%
1.02.1.02.03.01.15.10	Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Jumlah obat & BMHP	0	972	0	0	0,00%	0	972	#DIV/0!
1.02.1.02.03.01.21	Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pengelolaan limbah medis & non medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.1.02.03.01.21.06	Pengelolaan Limbah Medis B3	Terlaksananya pengelolaan limbah B3 RSUD	600	200	100	100	100%	100	400	66,67%
1.02.1.02.03.01.23	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan	100%	73,63%	0	0	0%	0	73,63%	73,63%
1.02.1.02.03.01.23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Tersusunnya standar pelayanan kesehatan, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur	100	100	0	0	0%	0	100	100,00%
1.02.1.02.03.01.23.02	Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit	Terselenggaranya akreditasi RS kelas C	2	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.02.1.02.03.01.23.03	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin	30	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.1.02.03.01.26	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	% penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	3,3%	3,40%	2,9%	5,12%	176,55%	3%	3,84%	116,36%
		% obat generik berlogo dalam persediaan RSUD	80%	49,26%	75%	49,07%	65,43%	76%	58,11%	72,64%
1.02.1.02.03.01.26.01	Pembangunan rumah sakit	Terbangunnya ruang bedah, ruang poli (saraf, urologi, paru, mata, kulit kelamin, jantung dan psikiatri) selasar dari UGD ke Ruang rawat Inap.	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.02.1.02.03.01.26.02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	Jumlah poliklinik yang dibangun	0	0	1	1	100,00%	0	1	#DIV/0!
1.02.1.02.03.01.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat - alat kesehatan RSUD (Bedah Urologi, Saraf), Poli (Mata, THT, Kulit kelamin, jantung, Jiwa)	57	13	0	0	0%	0	13	23%
1.02.1.02.03.01.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan rumah sakit	7.372	972	210	210	100,00%	250	1432	19,42%
1.02.1.02.03.01.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Terwujudnya mobil ambulance RSUD	3	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.02.1.02.03.01.26.21	Pengadaan mebeler rumah sakit	Tersedianya mebeleur rumah sakit	30	18	0	0	0,00%	0	18	60,00%
1.02.1.02.03.01.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tersedianya bahan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	30	8	1,38	1,49	0,00%	1,38	10,87	36,23%
1.02.1.02.03.01.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya bahan logistik rumah sakit	36	5	0	0	0,00%	0	5	13,89%
1.02.1.02.03.01.26.29	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan terbeli	0	46	0	0	0,00%	0	46	#DIV/0!
1.02.1.02.03.01.26.29	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Bagas Waras Jalan Raya Ir. Soekarno Km.2 Kelurahan Buntalan (2P0A)	Jumlah alat kesehatan terbeli	0	47	0	0	0,00%	0	47	#DIV/0!
1.02.1.02.03.01.26.31	Pengadaan Prasarana rumah sakit (DAK Bid Kesehatan)	Jumlah prasarana RS terbeli	0	0	0	0	0,00%	1	1	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.1.02.03.01.27	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	100%	100%	100%	0	0,00%	100%	66,67%	66,67%
1.02.1.02.03.01.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terpeliharanya gedung rumah sakit	6	1	0	0	0,00%	0	1	16,67%
1.02.1.02.03.01.27.02	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit	Terpeliharanya ruang poliklinik rumah sakit	6	1	0	0	0,00%	0	1	16,67%
1.02.1.02.03.01.27.03	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat / apotik	Terpeliharanya gudang obat/apotik	6	1	0	0	0,00%	0	1	16,67%
1.02.1.02.03.01.27.04	Pemeliharaan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I, II dan III)(VVIP,VIP,Kelas I, II dan III)	Terpeliharanya ruang rawat inap rumah sakit	6	1	0	0	0,00%	0	1	0,00%
1.02.1.02.03.01.27.05	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat	Terpeliharanya ruang gawat darurat rumah sakit	6	1	0	0	0,00%	0	1	16,67%
1.02.1.02.03.01.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Terpeliharanya Instalasi pengolah limbah RSUD	6	1	0	0	0,00%	0	1	16,67%
1.02.1.02.03.01.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya alat - alat kesehatan	57	7	0	0	0,00%	0	7	12,28%
1.02.1.02.03.01.27.18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Terpeliharanya mobil ambulance/jenazah	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1.02.1.02.03.01.33	Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan	Rata-rata % anggaran kesehatan dalam APBD	11,9%	9,00%	11,75%	9,76%	83,06%	11,80%	10,19%	85,60%
1.02.1.02.03.01.33.02	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Terlaksananya pengembangan SIMRS	2	1	0	0	0,00%	0	1	50,00%
1.02.1.02.03.01.33.03	Pembuatan web site rumah sakit	Terlaksananya pembuatan website rumah sakit	1	1	0	0	0,00%	0	1	100,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Penyusunan Profil rumah sakit	Tersusunnya profil rumah sakit	6	1	0	0	0,00%	0	1	16,67%
Fasilitasi dan pendampingan hukum rumah sakit	Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan hukum di RS	55	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Pelayanan Kesehatan	LOS	4	3,44	6	3,3	55%	5	3,91	97,83%
	BOR	70%	47,30%	60%	49,10%	81,83%	62%	52,80%	75,43%
	Persentase jumlah kasus kematian pasien terhadap total jumlah pasien	<20%	32,61%	<35%	27%	77,14%	<30%	29,87%	149%
Pelayanan Kesehatan RSUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan RSUD	600	100	100	100	100,00%	100	300	50,00%
Peningkatan Derajat Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	0%	84,06%	0%	0	0,00%	0%	84,06%	#DIV/0!
Penyediaan Sarana Fasilitasi Perawatan Kesehatan (DBHCT)	Jumlah alat kesehatan terbeli	0	75	0	0	0,00%	0	75	#DIV/0!

Klaten, 2 Juli 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

Lampiran - II
Surat Edaran Bupati Klaten
Nomor 050 / 079 / 31
tentang
Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020

PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

[illegible]

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	7	8			9	10	11	12	13
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			100	100			100				
	% Ibu hamil mendapatkan tablet Fe			95	98			91,71				
	% bayi yang dapat ASI Eksklusif			76	77			75,3				
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat											
	Persentase Pengelolaan limbah medis dan non medis			100	100			100				
	Cakupan desa <i>open defecation free</i> (ODF)			30	35			79,55				
	Persentase penggunaan jamban			96	100			95,80				
	Persentase penggunaan air bersih			98	100			99,20				
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			40	42			42,2				
	Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA			100	100			99				
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100	100			100				
	Cakupan desa/kelurahan Universal Chlid immunication (UCI)			100	100			100				
	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam			100	100			100				
	Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani			138	148			123				
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan											
	Angka kesakitan			90	100			47,98				
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin											
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin			5	5			9,67				
	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin			97	98			109				
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya											
	% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas			84	86			69,83				
	Cakupan Pelayanan Puskesmas			100	100			100				
	Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu			100	100			100				
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan			1	1			1,2				
1	Menurunnya kasus kematian Ibu					15	14			15	14	
2	Menurunnya Angka Kematian Bayi					10,09	10,07			10,09	10,07	
3	Menurunnya angka kematian Balita					1,63	1,61			1,63	1,61	
4	Menurunnya prevalensi gizi buruk (BB/U)					0,71	0,7			0,71	0,7	
5	Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4)					99	100			99	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	7	8			9	10	11	12	13
6	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)					100	100			100	100	
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3)					100	100			100	100	
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita					98	99			98	99	
9	Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)					100	100			100	100	
10	Cakupan Kunjungan Bayi					99,6	100			99,6	100	
11	Cakupan BBLR					5,02	5,00			5,02	5,00	
12	Cakupan Anemia Wanita Usia Subur					30	28			30	28	
13	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn					90	100			90	100	
14	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)					100	100			100	100	
15	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC					100	100			100	100	
16	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi					100	100			100	100	
17	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes mellitus					90	100			90	100	
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Gangguan jiwa berat					100	100			100	100	
19	Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV					90	100			90	100	
20	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun					100	100			100	100	
21	Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert					100	100			100	100	
22	Discharded Campak > 2/100.000 Penduduk					100	100			100	100	
23	Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam					100	100			100	100	
24	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 Jam					100	100			100	100	
25	Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi					100	100			100	100	
26	Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap					95	95			95	95	
27	Cakupan Bias C/DT/TD					98	98			98	98	
28	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat					100	100			100	100	
29	Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan					100	100			100	100	

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
2	3	4	7	8			9	10	11	12
Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajan anak sekolah					100	100			100	100
Cakupan desa siaga aktif					100	100			100	100
Kebijakan Yang Dibuat					9	11			9	11
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)					80	80,2			80	80,2
Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk Kesehatan					24	28			24	28
Proporsi Posyandu Mandiri					51	53			51	53
Persentase Desa Didampingi SMD MMD					100	100			100	100
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan					100	100			100	100
Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif					81	82			81	82
Cakupan Balita Stunting					26,8	26,6			26,8	26,6
Cakupan Balita Wasting					10,2	10			10,2	10
Cakupan Balita Underweight					18	18			18	18
Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes)					2,3	2,0			2,3	2,0
Partisipasi Posyandu (D/S)					85	85			85	85
Cakupan desa <i>open defecation free</i> (ODF)					100	100			100	100
Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja					40	50			40	50
Akreditasi Puskesmas					47,06	32,35			47,06	32,35
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin					5	5			5	5
Rasio Puskesmas per satuan penduduk					0,29	0,29			0,29	0,29
Rasio Pustu per satuan penduduk					0,22	0,22			0,22	0,22
Ratio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk					1,38	1,38			1,38	1,38

Klaten, 2 Juli 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten


dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

**PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

Nama Perangkat Daerah : UPT RSD Bagas Waras Dinkes Klaten

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pengelolaan limbah medis dan non medis			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin			5%	5%	5%	5%	0,53%		5%	5%	
3	% Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit			2,90%	3%	3,20%	3,30%	5,12%		3,20%	3,30%	
4	% obat generik berlogo dalam persediaan RSUD			75%	76%	77%	80%	49,07%		77%	80%	
5	Rata-rata % anggaran kesehatan dalam APBD			11,75%	11,80%	11,85%	11,90%	9,76%		10,00%	10,00%	
6	LOS			6 hari	5 hari	5 hari	4 hari	3,3 hari		5 hari	4 hari	
7	BOR			60%	62%	65%	70%	49,10%		60%	60%	
8	Jumlah kasus kematian pasien terhadap total jumlah pasien			< 35‰	< 30‰	< 25‰	< 20‰	27‰		< 25‰	< 20‰	
9	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	97%		100%	100%	

Klaten, 2 Juli 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten


dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN KLATEN

Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0101 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran			3.268.250.000,00				3.334.750.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	5000 surat	Dinas Kesehatan	12.250.000,00	APBD		5000 surat	12.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Rekening terbayar	3 jenis	Dinas Kesehatan	410.000.000,00	APBD		3 jenis	411.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah THL Administrasi Keuangan	71 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	975.000.000,00	APBD		71 orang	974.250.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL Kebersihan Kantor	37 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	515.000.000,00	APBD		37 orang	514.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	2 kali	Dinas Kesehatan	35.000.000,00	APBD		2 kali	55.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK tersedia	15 jenis	Dinas Kesehatan	75.000.000,00	APBD		15 jenis	75.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	3 jenis	Dinas Kesehatan	70.000.000,00	APBD		3 jenis	35.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	10 jenis	Laboratorium Air, IFK dan Dinas Kesehatan	20.000.000,00	APBD		10 jenis	32.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia	600 paket	Dinas Kesehatan	95.000.000,00	APBD		600 paket	105.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	100 kali	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	APBD		100 kali	215.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	70 kali	Dinas Kesehatan	100.000.000,00	APBD		70 kali	85.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah THL Pengamanan Kantor	47 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	650.000.000,00	APBD		47 orang	700.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 01.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah THL Pengemudi Kantor	8 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	111.000.000,00	APBD		8 orang	120.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik			3.050.000.000,00				1.115.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 02.03	Pembangunan gedung kantor	Gedung PSC 119 yang terbangun	1 lokasi	Dinas Kesehatan	2.000.000.000,00	APBD			
1.02 . 1.02.0101 . 02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional terbeli	2 unit	Dinas Kesehatan	500.000.000,00	APBD		1 unit	215.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	9 unit	Dinas Kesehatan	125.000.000,00	APBD		9 unit	200.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur terbeli	30 unit	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	APBD		30 unit	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0101 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	3 unit	Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan dan IFK	175.000.000,00	APBD		3 unit	300.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	47 unit	Dinas Kesehatan	100.000.000,00	APBD		47 unit	175.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 02.53	Penataan lingkungan kantor	Jumlah Lingkungan Kantor tertata	4 paket	Dinas Kesehatan	100.000.000,00	APBD		4 paket	175.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran aparatur			75.750.000,00				126.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 03.06	Pembinaan administrasi kepegawaian	Jumlah ASN terbina administrasi kepegawaian	100 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	75.750.000,00	APBD		100 orang	126.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat			5.035.000.000,00				5.521.750.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan	2 jenis	Dinas Kesehatan	4.500.000.000,00	DAK Bidang Kesehatan		2 jenis	5.040.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan	2 jenis	Dinas Kesehatan	85.000.000,00	APBD		2 jenis	89.250.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 15.04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah sarana pendukung instalasi Farmasi	100%	Dinas Kesehatan	100.000.000,00	DAK Bidang Kesehatan		100%	127.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 15.07	Pengelolaan manajemen obat	Jumlah manajemen obat di puskesmas yang dikelola	35 jenis	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	APBD		35 jenis	110.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 15.08	Distribusi obat dan e logistik (DAK Non Fisik)	Jumlah sasaran	34 puskesmas	Dinas Kesehatan	150.000.000,00	DAK Non Fisik		34 puskesmas	155.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4) - Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3) - Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3) - Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita - Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan) - Cakupan Kunjungan Bayi - Cakupan BBLR - Cakupan Anemia Wanita Usia Subur			6.835.000.000,00				7.106.750.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.16	Peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan Polindes	Jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang dilakukan pengkajian dan pembahasan dan kegiatan penurunan AKI dan AKB	150 kegiatan	Dinas Kesehatan	210.000.000,00	APBD		150 kegiatan	220.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.17	Bintek balai pengobatan/RB dan lab. Swasta	Jumlah fasyankes yang dibina	40 fasyankes	Dinas Kesehatan	30.000.000,00	APBD		40 fasyankes	35.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.18	Penunjang operasional PPPK	Jumlah Event PPPK	35 kegiatan	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	APBD		35 kegiatan	45.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.19	Penunjang operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan	Jumlah izin bidang kesehatan	100 buah	Dinas Kesehatan	75.000.000,00	APBD		100 buah	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0101 . 16.20	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas terdampingi menuju akreditasi	16 puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	50.000.000,00	APBD		11 puskesmas	50.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.21	Pemilihan paramedis, medis teladan dan Puskesmas berprestasi	Jumlah nakes terseleksi	9 nakes	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	APBD		9 nakes	220.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.22	Pembuatan buku profil kesehatan	Jumlah buku Profil	80 buku	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	APBD		80 buku	52.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.23	Penunjang operasional laboratorium kesehatan	Jumlah kunjungan pasien laboratorium	3375 pasien	Dinas Kesehatan	600.000.000,00	APBD		3375 pasien	687.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.24	Peningkatan manajemen Puskesmas	Jumlah puskesmas dan kegiatan pendukungnya	34 puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	150.000.000,00	APBD		34 puskesmas	165.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.25	Peningkatan kinerja klinis	Jumlah nakes	34 nakes	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100.000.000,00	APBD		34 puskesmas	120.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.26	Pembuatan buku KIA	Jumlah buku KIA	580 buku	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	APBD		580 buku	15.750.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.27	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah panggilan gawat darurat	300 panggilan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	-	APBD		300 panggilan	-
1.02 . 1.02.0101 . 16.29	Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan promotif preventif sebagai upaya kesehatan sekunder	50 kegiatan	Dinas Kesehatan	1.500.000.000,00	DAK Non Fisik		50 kegiatan	1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.30	Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Jumlah bumil miskin non PBI	500 ibu hamil	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1.600.000.000,00	DAK Non Fisik		500 ibu hamil	1.650.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.31	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah puskesmas yang dilakukan survey Akreditasi/penilaian akreditasi	16 puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	510.000.000,00	DAK Non Fisik		11 puskesmas	510.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 16.35	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DBHCHT)	Jumlah masyarakat yang tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan (bedrest, lansia, pasca op, pasca kemoterapi dan ibu bersalin)	3775 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1.700.000.000,00	DBHCHT		3775 orang	1.785.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	- Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan - Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah			200.000.000,00				293.750.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah Puskesmas yang terbina asuhan mandiri pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresure	10 puskesmas	Puskesmas	50.000.000,00	APBD		10 puskesmas	110.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 17.06	Pembinaan pengawasan obat dan makanan	Jumlah fasilitas diawasi	110 fasilitas	Dinas Kesehatan	75.000.000,00	APBD		110 fasilitas	105.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 17.07	Keamanan pangan jajanan anak sekolah	Jumlah sekolah terawasi	68 sekolah	Dinas Kesehatan	75.000.000,00	APBD		68 sekolah	78.750.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0101 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Cakupan desa siaga aktif - Kebijakan Yang Dibuat - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) - Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk Kesehatan - Proporsi Posyandu Mandiri - Persentase Desa Didampingi SMD MMD			225.000.000,00				202.125.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 19.06	Penyuluhan kesehatan masyarakat	Jumlah petugas penyuluh kesehatan	167 petugas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100.000.000,00	APBD		167 petugas	86.625.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 19.07	Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah UKBM yang terbina meliputi SBH, Posyandu, Poskestren, Posbindu	51 UKBM	Kabupaten Klaten	75.000.000,00	APBD		51 UKBM	57.750.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 19.08	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah petugas, desa PHBS dan puskesmas	106 petugas	Kabupaten Klaten	50.000.000,00	APBD		106 petugas	57.750.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan - Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif - Cakupan Balita Stunting - Cakupan Balita Wasting - Cakupan Balita Underweight - Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes) - Partisipasi Posyandu (D/S)			363.000.000,00				288.750.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 20.07	Upaya perbaikan gizi keluarga	Jumlah kegiatan pembinaan gizi	40 kegiatan	Dinas Kesehatan	213.000.000,00	APBD		40 kegiatan	178.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 20.08	Pembinaan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah kegiatan pembinaan pada masyarakat dan institusi	130 kegiatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	150.000.000,00	APBD		130 kegiatan	110.250.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	- Cakupan desa open defecation free (ODF) - Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja - Persentase Pengelolaan Limbah Medis dan Non Medis			650.000.000,00				1.275.750.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah Puskesmas dengan RW sehat percontohan	10 RW		250.000.000,00	APBD		10 RW	525.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 21.05	Peningkatan kesehatan lingkungan	Jumlah Puskesmas dan Desa terbina kesehatan lingkungan	100 lokasi	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	400.000.000,00	APBD		100 lokasi	750.750.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0101 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	- Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15 - 59) thn - Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th) - Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC - Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi - Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes mellitus - Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Gangguan jiwa berat - Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV - Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun - Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert - Discharged Campak > 2/100.000 Penduduk - Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam - Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 Jam - Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi - Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap - Cakupan Bias C/DT/TD			1.095.000.000,00				922.850.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 22.12	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kegiatan imunisasi, haji, surveilans dan penanggulangan KLB bencana	164 kegiatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	265.000.000,00	APBD		164 kegiatan	241.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 22.13	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular	Jumlah kegiatan pengendalian	40 kegiatan	Dinas Kesehatan	255.000.000,00	APBD		40 kegiatan	301.350.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 22.14	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Jumlah kegiatan pengendalian	250 kegiatan	Dinas Kesehatan	275.000.000,00	APBD		250 kegiatan	280.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 22.16	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (DBHCHT)	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih IVA	40 orang	Dinas Kesehatan	300.000.000,00	DBHCHT		8 orang	100.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas & RSUD			325.000.000,00				225.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina	11 rumah sakit	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	APBD		11 rumah sakit	15.000.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDMK	10 kegiatan	Dinas Kesehatan	150.000.000,00	APBD		10 kegiatan	199.500.000,00
1.02 . 1.02.0101 . 23.14	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan BLUD	75 kegiatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	125.000.000,00	APBD		75 kegiatan	10.500.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin			15.320.000.000,00				16.821.000.000,00
Pelayanan operasi katarak	Jumlah penderita katarak yang dioperasi	20 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	10.000.000,00	APBD		20 orang	10.500.000,00
Visum at Repertum	Jumlah orang visum et repertum	34 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	10.000.000,00	APBD		34 orang	10.500.000,00
Kemitraan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (BPJS)	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat	33000 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	15.000.000.000,00	APBD		33000 orang	15.750.000.000,00
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat rentan	Cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi PGOT, Penghuni Lapas/Rutan, Penghuni Panti Sosial, KLB/Wabah, Krisis Kesehatan, KIPI dan Gizi Buruk	100%	Kabupaten Klaten	300.000.000,00	APBD		100%	1.050.000.000,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	- Rasio Puskesmas per satuan penduduk - Rasio Pustu per satuan penduduk			12.235.000.000,00				20.987.750.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	Jumlah Puskesmas terpenuhi sarana dan prasarananya	34 puskesmas	Kabupaten Klaten	-	APBD		34 puskesmas	2.100.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	9 pustu	Puskesmas Pembantu	100.000.000,00	APBD			-
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab	2 puskesmas	Puskesmas Klaten Utara, Puskesmas Wonosari II	-	APBD		3 puskesmas	7.350.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu	Jumlah gedung puskesmas pembantu yang direhab	5 pustu	Puskesmas Pembantu	900.000.000,00	APBD		5 pustu	1.155.000.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terintegrasi informasi datanya dengan Dinas Kesehatan	34 puskesmas	Puskesmas	235.000.000,00	APBD		34 puskesmas	132.750.000,00
Pembangunan Puskesmas (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah Gedung Puskesmas terbangun	2 lokasi	Puskesmas Prambanan, Klaten Tengah	5.500.000.000,00	DAK Bid. Kesehatan		3 lokasi	5.000.000.000,00
Pembangunan Puskesmas (DBHCHT)	Jumlah Gedung Puskesmas terbangun	3 lokasi	Puskesmas Majegan, Cawas I, Ceper	5.200.000.000,00	DBHCHT		2 lokasi	4.620.000.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (DBHCHT)	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	10 jenis	Puskesmas	300.000.000,00	DBHCHT		10 jenis	630.000.000,00
JUMLAH				48.677.000.000,00				58.221.225.000,00

Klaten, 2 Juli 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

Lampiran - III
Surat Edaran Bupati Klaten
Nomor 050 / 079 / 31
tentang
Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2020

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN KLATEN**

Nama Perangkat Daerah : UPT PUSKESMAS

[illegible]

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Kalikotes	57 kegiatan	Puskesmas Kalikotes	622.000.000,00	DAK Bid. Kesehatan		64 kegiatan	653.100.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas kalikotes terpenuhi	43 kegiatan	Puskesmas Kalikotes	1.107.750.000,00	BLUD		47 kegiatan	1.163.137.500,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Ngawen	100 kegiatan	Puskesmas Ngawen	683.865.000,00	DAK Bid. Kesehatan		100 kegiatan	718.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas ngawen terpenuhi	46 kegiatan	Puskesmas Ngawen	1.529.550.000,00	BLUD		50 kegiatan	1.575.400.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Kebonarum	70 kegiatan	Puskesmas Kebonarum	678.000.000,00	DAK Bid. Kesehatan		70 kegiatan	710.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas kebonarum terpenuhi	40 kegiatan	Puskesmas Kebonarum	750.000.000,00	BLUD		40 kegiatan	780.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Wedi	90 kegiatan	Puskesmas Wedi	716.600.000,00	DAK Bid. Kesehatan		90 kegiatan	752.430.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas wedi terpenuhi	40 kegiatan	Puskesmas Wedi	2.562.000.000,00	BLUD		45 kegiatan	2.690.100.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Jogonalan I	120 kegiatan	Puskesmas Jogonalan I	605.600.000,00	DAK Bid. Kesehatan		125 kegiatan	635.800.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas jogonalan I terpenuhi	46 kegiatan	Puskesmas Jogonalan I	1.837.500.000,00	BLUD		46 kegiatan	1.929.375.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Jogonalan II	70 kegiatan	Puskesmas Jogonalan II	701.000.000,00	DAK Bid. Kesehatan		70 kegiatan	701.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas jogonalan II terpenuhi	40 kegiatan	Puskesmas Jogonalan II	1.155.000.000,00	BLUD		40 kegiatan	1.155.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Gantiwarno	115 kegiatan	Puskesmas Gantiwarno	720.510.000,00	DAK Bid. Kesehatan		130 kegiatan	756.535.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas gantiwarno terpenuhi	55 kegiatan	Puskesmas Gantiwarno	2.564.000.000,00	BLUD		60 kegiatan	2.692.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Prambanan	100 kegiatan	Puskesmas Prambanan	678.615.000,00	DAK Bid. Kesehatan		105 kegiatan	712.546.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								

[illegible]

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas karangnongko terpenuhi	20 kegiatan	Puskesmas Karangnongko	1.230.285.000,00	BLUD		20 kegiatan	1.230.500.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Jatinom	40 kegiatan	Puskesmas Jatinom	772.300.000,00	DAK Bid. Kesehatan		40 kegiatan	780.300.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas jatinom terpenuhi	55 kegiatan	Puskesmas Jatinom	1.648.000.000,00	BLUD		55 kegiatan	1.730.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Kayumas	90 kegiatan	Puskesmas Kayumas	630.840.000,00	DAK Bid. Kesehatan		90 kegiatan	630.840.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas kayumas terpenuhi	35 kegiatan	Puskesmas Kayumas	1.098.436.500,00	BLUD		35 kegiatan	1.153.358.325,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Karanganom	100 kegiatan	Puskesmas Karanganom	704.865.000,00	DAK Bid. Kesehatan		100 kegiatan	704.865.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas karanganom terpenuhi	45 kegiatan	Puskesmas Karanganom	1.986.717.600,00	BLUD		45 kegiatan	1.986.717.600,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Tulung	70 kegiatan	Puskesmas Tulung	663.700.000,00	DAK Bid. Kesehatan		75 kegiatan	695.500.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas tulung terpenuhi	60 kegiatan	Puskesmas Tulung	1.244.900.000,00	BLUD		65 kegiatan	1.304.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Majegan	90 kegiatan	Puskesmas Majegan	658.875.000,00	DAK Bid. Kesehatan		90 kegiatan	658.875.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas majegan terpenuhi	40 kegiatan	Puskesmas Majegan	1.146.600.000,00	BLUD		40 kegiatan	1.146.600.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Polanharjo	125 kegiatan	Puskesmas Polanharjo	708.225.000,00	DAK Bid. Kesehatan		130 kegiatan	743.636.250,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas polanharjo terpenuhi	50 kegiatan	Puskesmas Polanharjo	1.683.000.000,00	BLUD		55 kegiatan	1.767.150.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Delanggu	80 kegiatan	Puskesmas Delanggu	823.830.000,00	DAK Bid. Kesehatan		80 kegiatan	865.022.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas delanggu terpenuhi	70 kegiatan	Puskesmas Delanggu	2.542.785.000,00	BLUD		80 kegiatan	2.669.925.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								

[illegible]

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Jambukulon	115 kegiatan	Puskesmas Jambukulon	640.080.000,00	DAK Bid. Kesehatan		115 kegiatan	672.084.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas jambukulon terpenuhi	39 kegiatan	puskesmas Jambukulon	1.525.659.000,00	BLUD		39 kegiatan	1.678.225.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Pedan	130 kegiatan	Puskesmas Pedan	842.000.000,00	DAK Bid. Kesehatan		130 kegiatan	842.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas pedan terpenuhi	45 kegiatan	Puskesmas Pedan	2.600.000.000,00	BLUD		50 kegiatan	2.750.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Karangdowo	100 kegiatan	Puskesmas Karangdowo	821.500.000,00	DAK Bid. Kesehatan		100 kegiatan	903.650.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas karangdowo terpenuhi	50 kegiatan	Puskesmas Karangdowo	3.300.000.000,00	BLUD		60 kegiatan	3.500.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Cawas I	130 kegiatan	Puskesmas Cawas I	705.705.000,00	DAK Bid. Kesehatan		130 kegiatan	776.275.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas cawas I terpenuhi	43 kegiatan	Puskesmas Cawas I	1.768.000.000,00	BLUD		45 kegiatan	1.945.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Cawas II	75 kegiatan	Puskesmas Cawas II	546.315.000,00	DAK Bid. Kesehatan		75 kegiatan	573.630.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional puskesmas cawas II terpenuhi	23 paket	Puskesmas Cawas II	1.653.271.000,00	BLUD		25 paket	1.735.934.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Trucuk I	50 kegiatan	Puskesmas Trucuk I	703.000.000,00	DAK Bid. Kesehatan		50 kegiatan	774.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas trucuk I terpenuhi	50 kegiatan	Puskesmas Trucuk I	1.930.000.000,00	BLUD		50 kegiatan	1.950.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Trucuk II	100 kegiatan	Puskesmas Trucuk II	686.000.000,00	DAK Bid. Kesehatan		110 kegiatan	720.500.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1.02 . 1.02.0200 . 23.07	Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas trucuk II terpenuhi	3 kegiatan	Puskesmas Trucuk II	1.730.000.000,00	BLUD		3 kegiatan	1.780.000.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02 . 1.02.0200 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan primer di Puskesmas Bayat	100 kegiatan	Puskesmas Bayat	792.855.000,00	DAK Bid. Kesehatan		100 kegiatan	792.855.000,00
1.02 . 1.02.0200 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2021	
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penunjang Kegiatan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang operasional puskesmas bayat terpenuhi	25 kegiatan	Puskesmas Bayat	4.047.900.000,00	BLUD		30 kegiatan	4.047.900.000,00
JUMLAH				85.823.156.600,00				89.835.530.775,00

Klaten, 2 Juli 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten


dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19670210 199603 1 006

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN KLATEN**

Nama Perangkat Daerah : UPT RSD Bagas Waras Dinkes Klaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (tahun n)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib								
1.02	Bidang Urusan Kesehatan								
1.02.1.02.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	RSD Bagas Waras	4.100.000.000	APBD	-	100%	4.550.000.000
1.02.1.02.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis rekening terbayar	4 rekening	RSD Bagas Waras	1.950.000.000	APBD		4 rekening	2.100.000.000
1.02.1.02.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor	30 orang	RSD Bagas Waras	1.100.000.000	APBD		30 orang	1.300.000.000
1.02.1.02.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah tenaga pengamanan kantor	30 orang	RSD Bagas Waras	1.000.000.000	APBD		30 orang	1.100.000.000
1.02.1.02.03.01.01.24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	7 dokumen	RSD Bagas Waras	50.000.000	APBD		7 dokumen	50.000.000
1.02.1.02.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	RSD Bagas Waras	400.000.000	APBD	-	100%	600.000.000
1.02.1.02.03.01.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	jumlah lingkungan kantor tertata	1 taman	RSD Bagas Waras	400.000.000	APBD		1 taman	600.000.000
1.02.1.02.03.01.26	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	Ratio tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	1,38	RSD Bagas Waras	13.500.000.000	APBD		1,38	9.500.000.000
1.02.1.02.03.01.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan terbeli	14 jenis	RSD Bagas Waras	2.920.000.000	DAK Bidang Kesehatan		5 jenis	500.000.000
1.02.1.02.03.01.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	jumlah obat-obatan rumah sakit	250 jenis	RSD Bagas Waras	2.000.000.000	APBD		250 jenis	8.000.000.000
1.02.1.02.03.01.26.31	Pengadaan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah prasarana Rumah Sakit terbeli	1 unit	RSD Bagas Waras	8.580.000.000	DAK Bidang Kesehatan		1 unit	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (tahun n)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.33	PROGRAM MANAJEMEN INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN	Persentase Pengelolaan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	100%	RSD Bagas Waras	3.500.000.000			100%	1.000.000.000
2.03.01.33.02	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Jumlah SIMRS yang dibuat / dikembangkan	1 SIMRS	RSD Bagas Waras	3.500.000.000	DAK Bidang Kesehatan		1 SIMRS	1.000.000.000
2.03.02.36	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur	70%	RSD Bagas Waras	43.599.095.276			70%	40.000.000.000
2.03.02.36.01	Pelayanan kesehatan RSUD	Persentase pelayanan kesehatan	100%	RSD Bagas Waras	43.599.095.276	BLUD		100%	40.000.000.000
	JUMLAH				65.099.095.276				55.650.000.000

Klaten, 2 Juli 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten


dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006